

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN

Sugito Suwito

Universitas Trilogi, Jakarta 12760, Indonesia
e-mail: sugito_suwito@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh variable kepemimpinan, tata pemerintahan dan etika pemerintahan terhadap efektivitas pemberdayaan dan dampaknya pada kesejahteraan keluarga miskin di kota Bekasi. Metode penelitian dilakukan berdasarkan survei terhadap responden keluarga miskin anggota Posdaya beserta para *stakeholdernya* dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik *Structural Equation Modeling* (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variable yang diteliti memiliki pengaruh signifikan pada efektivitas pemberdayaan yang selanjutnya berdampak pada kesejahteraan keluarga miskin.

Kata kunci: efektifitas, tata pemerintahan yang baik, paradigma baru, SEM

The Effectiveness of Empowerment Program

Abstract

The research objective is to test the influence of the variables on leadership, good governance and government ethics on empowerment's effectiveness and its effect on the welfare of the poor in Bekasi. The result has been processed and analyzed based on Structural Equation Modeling (SEM) technique. It shows that all of the three exogenous variables are significantly influencing the process and the empowerment's effectiveness, in turn, will lead to the prosperity of the poor families at grass root level.

Keywords: effectiveness, good governance, new paradigm, SEM

Suatu program akan lebih terjamin dalam mencapai target yang telah ditetapkan apabila dilaksanakan secara efektif. Walaupun program telah dirumuskan secara cermat ditingkat pusat, hasilnya belum tentu memuaskan apabila pelaksanaannya di daerah tidak efektif. Sebagai contoh, program penanggulangan kemiskinan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat dan didukung dengan dana yang memadai, ternyata pelaksanaannya tidak cukup berhasil. Tulisan ini menyajikan analisa terhadap efektivitas program pemberdayaan keluarga miskin dari sudut pandang Ilmu Pemerintahan dan dengan menerapkan metode analisa *Structural Equation Model* (SEM).

Masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia sekarang adalah: kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat kaya dan miskin. Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh relatif baik, namun masalah yang disebutkan tadi tidak terlihat

tanda-tanda makin berkurang, seperti ditunjukkan oleh informasi statistik yang tersedia. (BPS, 2010).

Pembangunan kesejahteraan rakyat, utamanya rakyat lapis bawah ternyata tidak sebagai pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB. Pengentasan kemiskinan meskipun mengalami penurunan tetapi tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. Disamping itu sejak digulirkannya era reformasi, kesenjangan kesejahteraan rakyat pada tahun 2013 jauh lebih buruk dibandingkan kondisi sepuluh tahun sebelumnya. Fakta ini telah memperkuat dugaan adanya paradigma baru, bahwa pembangunan kesejahteraan rakyat tidak dapat direalisasikan hanya dengan melakukan pembangunan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan tinggi, tetapi harus dengan kebijakan yang dengan jelas mendorong pemberdayaan masyarakat lapis bawah agar dapat makin mandiri (Stiglitz, et al, 2009). Berdasarkan berbagai indikator ke-

timbangan kesejahteraan, seperti Gini Ratio, Indeks Theil, Indeks-L, semua menunjukkan makin parahnya kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan yang miskin (BPS, 2010).

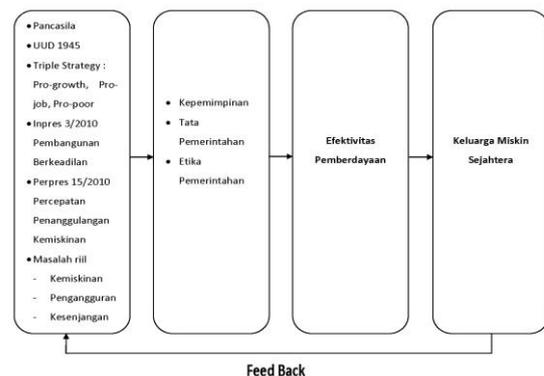
Dari sudut pandang Ilmu Pemerintahan ada tiga variabel yang diduga sangat besar pengaruhnya pada efektivitas pemberdayaan masyarakat yaitu variabel kepemimpinan, tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan etika pemerintahan. Penelitian dilakukan di wilayah Kota Bekasi (INSTAT, 2012), dalam penelitian itu telah dilakukan pengamatan secara khusus terhadap salah satu program pemberdayaan keluarga yang dilakukan dan difasilitasi melalui forum Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya).

Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis adanya hubungan kausal antara berbagai variabel yang dipelajari dengan efektivitas upaya pemberdayaan pada umumnya, dan khususnya pada kesejahteraan keluarga miskin, yang didasarkan pada model struktural dan model pengukuran yang menggambarkan hubungan kausal antar variabel laten, dan antara variabel laten dengan variabel terukur maupun antar variabel terukur, melalui indikator, dimensi dan konstruk yang direfleksikan oleh besaran statistik sebagai dasar kelayakan kedua model dalam analisis. Dalam tahap selanjutnya akan dilakukan uji statistik terhadap kesesuaian antara model yang dispesifikasikan dengan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka perlu dilakukan re-spesifikasi dari model untuk dilakukan pengujian ulang atas kesesuaiannya.

Pemberdayaan memerlukan dukungan unsur-unsur kepemimpinan, tata pemerintahan (*good governance*) dan etika pemerintahan yang merupakan pendekatan untuk mendorong agar masyarakat dapat tergerak maju atas potensi dan kekuatannya sendiri. Dalam hal ini, dukungan dari pemerintah daerah sangat penting agar upaya pemberdayaan dapat berhasil. Dukungan pemerintah daerah akan lebih mudah dilaksanakan apabila dapat dikembangkan konsep *good governance*. Untuk itu pemerintah daerah bersama lembaga perwakilan rakyat setempat beserta perangkatnya yang langsung berhubungan dengan masyarakat harus memahami konsep *good governance* dengan baik agar sepenuhnya memperoleh dukungan rakyat dan dapat melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat setempat.

Keikutsertaan masyarakat dilakukan melalui pemuka masyarakat sebagai pemimpin digaris depan yang langsung berhadapan dengan masyarakat lokal, mereka memiliki kemampuan dan berpengalaman dalam mendorong dan mengangkat kehidupan keluarga miskin dari kebiasaan yang membelenggu (Kouzes and Posner, 1993). Pemimpin dan tokoh masyarakat di tingkat lokal ini memerlukan kualifikasi yang berbeda, yaitu dituntut untuk dapat menyelami dan menyatu dengan warga miskin, agar ide-idenya diterima oleh warga miskin dan dapat menyadarkannya bahwa semua usaha dilakukan untuk, oleh dan dari warga sendiri. Dengan demikian semua yang akan dilakukan tidak akan mengusik kepercayaan, adat istiadat dan kehidupan pribadinya.

Apabila proses pemberdayaan dilihat sebagai suatu cara berfikir kesisteman, maka dari segi fungsinya, pemberdayaan ditelaah sebagai suatu rangkaian *input-process-output* diikuti *feedback* (Hubeis, 2008). *Input*, dalam pemberdayaan dimulai dengan adanya landasan konstitusional berdasarkan pembukaan UUD 1945, lalu berbagai peraturan dan perundangan yang terkait, diikuti dengan berbagai kebijakan dan strategi pembangunan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Semua kebijakan itu diikuti dengan dukungan anggaran dan birokrasi yang menyertainya. "*Input*" menjadi sasaran penelitian untuk dicarikan solusi dan juga rekomendasinya.

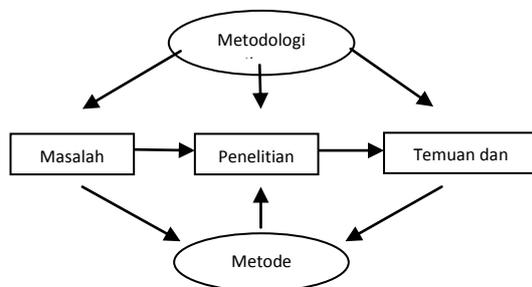


Gambar 1. Kerangka Pemikiran Menuju Efektivitas Pemberdayaan dan Keluarga Miskin yang Sejahtera

"*Process*" yang akan mengolah *input* utamanya adalah program pemberdayaan, pengembangan Posdaya di Kelurahan yang banyak dihuni keluarga miskin, didukung oleh

variabel-variabel kepemimpinan, tata pemerintahan dan etika pemerintahan yang baik dan kondusif untuk melakukan pemberdayaan. Pada bagian “*output*” diharapkan pelaksanaan proses akan menghasilkan efektivitas pemberdayaan pada umumnya dan khususnya dalam bentuk makin meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin. Untuk jelasnya cara berpikir kesisteman seperti dijelaskan di atas dapat disajikan pada Gambar 1.

Keberfungsian ilmu pemerintahan tergantung pada metodologi ilmu yang dipergunakan. Metodologi ilmu mempunyai hubungan sangat erat dengan metodologi penelitian, keduanya bersifat saling mengisi dan saling memperkuat. Hubungan keduanya bisa dijelaskan dengan Gambar 2.



Gambar 2. Hubungan ilmu dengan penelitian

Pelayanan publik dan penguatan birokrasi.

Paul A. Volker ketua *National Commission on the Public Service* di Amerika Serikat pada awal abad ke-21 ini menyatakan bahwa: *Government work ought to be a respected source of pride. All too frequently it is not.* Rasanya ungkapan itu tidak hanya berlaku di Amerika Serikat, tetapi hampir diseluruh negara didunia termasuk di Indonesia. Kinerja pemerintah yang rendah dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat meskipun telah menghabiskan anggaran negara yang besar, merupakan fenomena yang banyak terjadi meskipun dalam negara yang bersifat demokratis seperti di Indonesia.

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah, dalam hubungan pemerintahan, karena pemerintah memiliki kewenangan yang sah untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan setiap warga negara akan produk pemerintahan, yaitu jasa publik dan layanan civil. Dalam kaitan ini maka peranan birokrasi sangat penting dan

menentukan dalam menyediakan pelayanan bagi masyarakat (Osborne & Gabler, 1993). Karena itu program reformasi birokrasi menjadi sangat penting untuk memungkinkan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak menurun, Masalah yang kita hadapi adalah bahwa dalam era reformasi sekarang ini, justru sektor birokrasi yang paling lamban dalam melakukan reformasi atas dirinya.

Pelayanan publik yang efektif mensyaratkan responsivitas dan akuntabilitas yang tinggi dari pemerintah. Kondisi ini dipahami dapat terlaksana melalui pemberian otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Kertapraja, 2010). Dengan otonomi daerah, pemerintahan daerah mempunyai kesempatan besar untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintahan daerah melalui seluruh perangkatnya, diharapkan secara nyata dapat mencerminkan pewujudan pelayanan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu (Hamdi, 2009). Apabila kondisi ini dapat terus berkembang maka pemerintahan daerah beserta perangkatnya akan dengan mudah mendukung dan memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat di daerahnya. Dengan memberikan perhatian yang memadai pada pemberdayaan keluarga miskin, berarti kebutuhan setiap warga negara akan produk pemerintahan dalam hubungan pemerintahan telah terpenuhi.

Efektivitas Pemberdayaan

Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan merupakan prasyarat utama untuk memperbaiki derajat kesejahteraan rakyat. Tujuan utama pembangunan millenium atau *Millenium Development Goals (MDGs)* di Indonesia, dengan prioritas pengentasan kemiskinan, menetapkan proporsi penduduk miskin pada tahun 2015 diturunkan menjadi setengahnya atau 8,2% dari jumlah penduduk. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 sasaran itu dipercepat pencapaiannya pada tahun 2009 (Bappenas, 2008). Keputusan itu merupakan tekad dan kebijakan pemerintah yang perlu didukung semua instansi dan institusi pembangunan. Agar supaya upaya itu berhasil dengan baik perlu diikuti pengembangan gerakan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan secara intensif (Suyono, 2009).

Gerakan pemberdayaan keluarga yang intensif itu memang sangat diperlukan, karena meskipun dalam dokumen RPJM 2004-2009

telah ditetapkan persentase penduduk miskin tinggal menjadi 8,2% pada tahun 2009, dan untuk keperluan itu telah dialokasikan dana APBN maupun APBD dalam jumlah besar untuk mencapai target-target MDGs dan khususnya dalam program penanggulangan kemiskinan, namun kenyataannya persentase penduduk miskin pada tahun 2009 masih sebesar 14,15%. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan penanggulangan kemiskinan meskipun sudah tercantum dalam RPJM ternyata pelaksanaannya tidak efektif, yang menandakan bahwa efektivitas pemberdayaan merupakan elemen yang sangat penting demi suksesnya program penanggulangan kemiskinan.

Demikian pula halnya dengan kota Bekasi, data yang termuat dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2008-2013, menunjukkan bahwa besarnya realisasi investasi di kota Bekasi tiap tahun selalu jauh (rata-rata 10%) diatas target, dengan APBDnya yang juga rata-rata meningkat dengan 10,3% tiap tahun, termasuk dana untuk penanggulangan kemiskinan. Namun jumlah penduduk miskin di kota Bekasi, menurut penelitian BPS, meningkat dari 5,78% pada tahun 2009 menjadi 6,30% pada tahun 2010, meskipun pemberdayaan terhadap keluarga miskin terus dilakukan di kota Bekasi, sebagaimana halnya juga yang terjadi di kota-kota lain di Indonesia. Fakta ini semua menunjukkan betapa pentingnya efektivitas pemberdayaan, karena dengan mengupayakan pemberdayaan yang makin efektif maka diharapkan jumlah penduduk miskin akan menurun, artinya ada hubungan yang jelas antara dana dan daya yang telah digunakan dalam pemberdayaan keluarga miskin dengan penurunan jumlah penduduk miskin.

METODE PENELITIAN

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam pembentukan model dan menetapkan hubungan kausal diantara variabel laten dan variabel teramati, utamanya didasarkan pada teori ilmu pemerintahan, yang didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, yaitu hubungan antara lembaga publik yang memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan pengaturan, melayani kepentingan publik dan melaksanakan pemberdayaan (Hamdi, 2009). Lokasi dimana

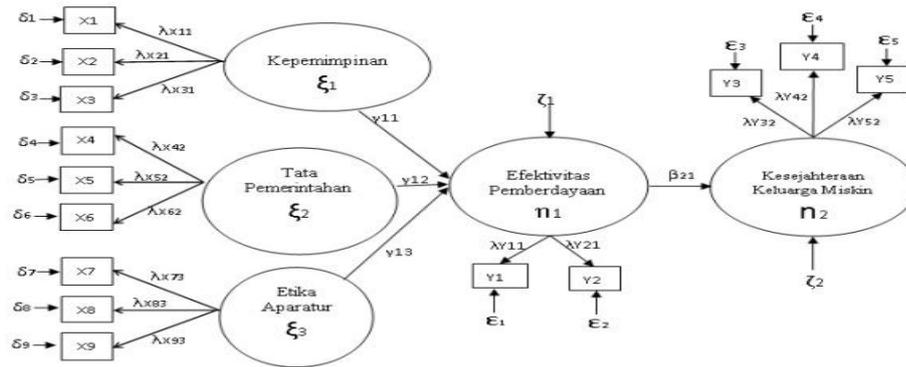
hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah itu terjadi adalah dititik, atau digaris depan dimana persinggungan terjadi bagi lembaga publik untuk merealisasikan perannya, yaitu melakukan pengaturan, pelayanan terhadap segala jenis kebutuhan masyarakat dan melaksanakan pemberdayaan utamanya bagi masyarakat lapis bawah, sesuai fokus dari studi yang dilaksanakan ini. Digaris persinggungan antara yang memerintah dan yang diperintah ini, dimana lembaga publik merealisasikan berbagai perannya, perlu dilakukan *social-control* yang ketat agar segala bentuk implementasi dari kebijakan pemerintah dapat diawasi (Ndraha, 2010).

Sebagai konsekuensi dari pengertian diatas, maka berbagai konstruk, konsep, atau variabel laten yang bersifat bebas (*exogeneous*), yaitu kepemimpinan, tata pemerintahan yang baik (*good-governance*) serta etika pemerintahan harus ditarik kebawah dimana garis persinggungan terjadi. Ini tidak berarti bahwa birokrasi pemerintah harus melaksanakan segalanya sampai keakar rumput (*grass-root*), karena dalam paradigma *good-governance* terdapat 3 (tiga) domain dalam *governance* yang memiliki peranan berbeda, yaitu negara atau pemerintahan (*state*), sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*) dan masyarakat (*society*), yang masing-masing memiliki peranan seimbang dan berbeda (Wasistiono, 2003).

Dalam penelitian ini dikaji efektivitas pemberdayaan yang dilakukan pemerintah beserta berbagai aparat kepanjangannya itu serta dampaknya pada kesejahteraan keluarga miskin, terutama keluarga miskin yang tergabung dan menjadi kelompok sasaran dari kegiatan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya).



Gambar 3. Tiga domain dari paradigma *good governance*



Gambar 4. Diagram Model SEM

Menghitung pengaruh dalam bentuk persentase dapat dilakukan dengan cara mengalikan koefisien jalur dengan koefisien korelasinya.

Setelah mengetahui pengaruh individu variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen secara simultan dapat dilihat dari nilai *R-square*. Nilai *R-square* ini menggambarkan seberapa besar varian variabel laten endogen yang mampu dijelaskan oleh variabel laten eksogen secara simultan. Semakin tinggi nilai ini menunjukkan kebaikan model.

Evaluasi model keseluruhan dapat dilihat dari nilai *Goodness of Fit (GOF)*. *GOF* atau disebut uji kebaikan model mengevaluasi model pengukuran dan model struktural secara simultan. SEM tidak memiliki uji statistik tunggal terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan dalam memprediksi sebuah model maka dikembangkan beberapa ukuran untuk menentukan model yang terbentuk layak atau tidak. Secara keseluruhan kriteria ukuran *goodness of fit* dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ukuran kecocokan absolut, ukuran kecocokan inkremental dan ukuran kecocokan parsimoni.

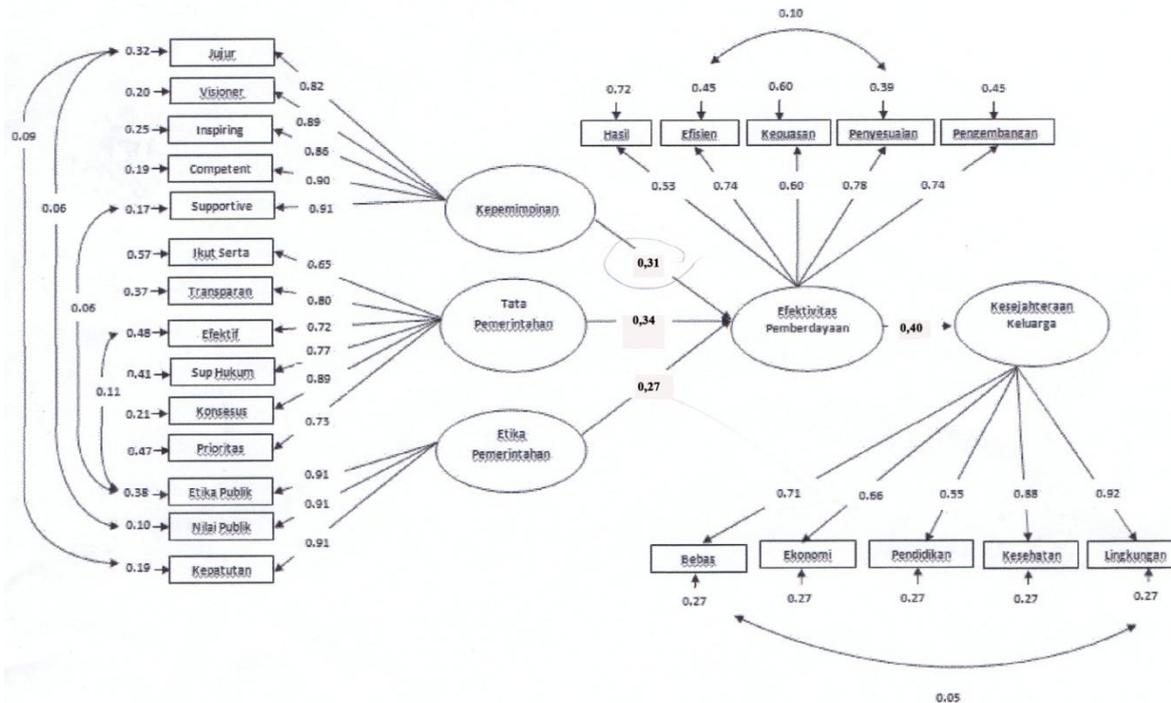
Confirmatory Factor Analysis (CFA) merupakan tahap evaluasi terhadap model pengukuran variabel laten. Model *CFA* dalam penelitian ini adalah *second order*. Tahap *CFA* digunakan untuk mengetahui seberapa baik indikator yang digunakan dalam penelitian mengukur variabel latennya. Evaluasi model pengukuran ini meliputi validitas indikator, reliabilitas dimensi atau variabel laten serta seberapa baik skor variabel laten atau skor dimensi mengandung keragaman atau varians data indikator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil model lengkap (*Full hybrid model*) hubungan antara variabel laten dengan dimensinya serta hubungan antara variabel laten dengan variabel laten lainnya (Gambar 5).

Analisa model struktural dan model lengkap yang diuraikan dalam temuan yang digambarkan pada diagram jalur model SEM diatas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari variabel efektivitas pemberdayaan terhadap kesejahteraan keluarga miskin, besarnya pengaruh meskipun relatif kecil namun positif dan signifikan. Semua pengaruh itu relatif kecil, karena kenyataannya keluarga miskin di kota Bekasi memang belum banyak mengalami perbaikan nasib seperti ditunjukkan oleh data statistik mengenai jumlah penduduk miskin di kota Bekasi. Agar penanganan kemiskinan dapat lebih efektif, dalam implementasi kebijakan diperlukan perhatian lebih besar pada instrumen kebijakan yang ditunjukkan oleh ketiga variabel eksogen dalam model struktural studi ini. Dalam penelitian tentang pendapat/persepsi/sikap responden menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan merupakan variabel yang dianggap penting, namun selama ini belum diimplementasikan secara memadai, sehingga mereka berpendapat, seperti ditunjukkan hasil survei, bahwa semua variabel eksogen dalam studi ini memang berpengaruh tetapi belum sepenuhnya di-realisasikan.

Uji kecocokan ini digunakan untuk melihat uji kelayakan model yang terbentuk dari full hybrid model yaitu model pengukuran antara variabel laten dengan dimensinya dan model struktural yaitu hubungan antara variabel laten yang dihipotesiskan (Tabel 1).



Gambar. 5 Full hybrid model (koefisien jalur yang distandardkan)

Table 1. Goodness of Fit Model Keseluruhan

Kriteria GoF	Standard Nilai	Nilai Model	Keterangan
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square	> 0,05	0,0106	Tidak Fit
Satorra-Bentler Scaled Chi-Square	> 0,05	0,0642	Fit
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)	< 0,08	0,0258	Fit
Normed Fit Index (NFI)	>= 0,9	0,972	Fit
Non-Normed Fit Index (NNFI)	>= 0,9	0,994	Fit
Comparative Fit Index (CFI)	>= 0,9	0,996	Fit
Incremental Fit Index (IFI)	>= 0,9	0,996	Fit
Relative Fit Index (RFI)	>= 0,9	0,960	Fit
Critical N (CN)	> 200	25,143	Fit
Root Mean Square Residual (RMR)	< 0,05	0,0278	Fit
Standardized RMR	< 0,05	0,0656	Tidak Fit
Goodness of Fit Index (GFI)	>= 0,9	0,923	Fit
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)	>= 0,9	0,880	Marginal Fit

Secara keseluruhan model hubungan antara variabel laten yang dihipotesiskan dan model pengukuran berada dalam tahap layak (fit). Satorra-Bentler Scaled Chi-Square mempunyai nilai signifikansi *p-value* 0,0642 > 0,05 maka terima hipotesis nol yang menyatakan bahwa matrix covariance hasil prediksi tidak jauh berbeda dengan matrix covariance data atau

model dapat tepat diprediksi oleh data empiris yang ada. Pencarian residual berada disekitar garis miring melintang yang mengikuti pola distribusi normal.

Nilai RMSEA 0,0258 lebih kecil dari 0,08 (fit) bahkan lebih kecil dari 0,05 (close fit). Ukuran GFI adalah 0,923 menyatakan bahwa model fit (layak) meskipun berada dalam rentang marginal jika dilihat dari ukuran AGFI. Kecukupan ukuran sample yang dinyatakan oleh Critical N (CN) 259,143 > 200 menyatakan bahwa sample data sangat fit untuk menjelaskan hubungan antara variabel laten. Ukuran incremental yang dinyatakan dengan NFI, NNFI, IFI, CFI dan RFI > 0,90 menyatakan bahwa model dengan respesifikasi dalam bentuk penambahan modifikasi index memiliki tingkat kelayakan yang lebih baik. Ukuran parsimony yaitu AIC, yang diperoleh nilai dengan model AIC adalah 437,706 lebih dekat dengan nilai saturated AIC sebesar 600 dibandingkan dengan Independent AIC yang bernilai 8102,457. Demikian halnya dengan model CAIC yaitu sebesar 917,134 yang lebih dekat dengan Saturated CAIC sebesar 1944,192 dibandingkan independent CAIC yang mencapai 8209,992.

Dengan demikian uji kelayakan model, yang terbentuk dari full hybrid model, yaitu: **pertama** model pengukuran antara variabel laten dengan dimensi-dimensinya, **kedua** model structural,

yang menunjukkan hubungan antar variabel laten yang diangkat dalam hipotesis, keduanya menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (fit).

Berdasarkan hasil penelitian seperti digambarkan pada diagram jalur model SEM di Gambar 5, dapat dijelaskan pengaruh dari variabel laten *exogeneous* terhadap variabel laten *endogeneous* dan pengaruh variabel laten terhadap variabel terukur. Beberapa pengaruh yang terkait dalam penelitian ini meliputi pengaruh kepemimpinan terhadap efektivitas pemberdayaan, tata pemerintahan terhadap efektivitas pemberdayaan, etika pemerintahan terhadap efektivitas pemberdayaan, dan pengaruh efektivitas pemberdayaan terhadap kesejahteraan keluarga miskin di Kota Bekasi.

Pengaruh Kepemimpinan terhadap Efektivitas Pemberdayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh pada efektivitas pemberdayaan. Meskipun demikian persentase pengaruh itu belum terlalu besar karena situasi dan kondisi di kota Bekasi belum memungkinkan dikembangkannya kepemimpinan sesuai paradigma yang membuat pemberdayaan menjadi benar-benar efektif. Betapapun kecilnya namun terbukti bahwa pengaruh kepemimpinan terhadap efektivitas pemberdayaan itu nyata, dan uji statistik menyatakan bahwa hasilnya memang signifikan. Kemungkinan cukup besar, mengingat signifikansi hasil uji statistik tersebut, bahwa apabila persyaratan seperti dikembangkannya peranan kepemimpinan sosial yang lebih besar maka pengaruh kepemimpinan pada efektivitas pemberdayaan akan makin jelas. Sesuai situasi dan kondisi masyarakat lapis bawah yang perlu memperoleh pemberdayaan saat ini, dan keberadaan kepemimpinan yang menangani pemberdayaan tersebut, dari analisa telah memberikan hasil bahwa besarnya koefisien jalur antara kepemimpinan terhadap efektivitas pemberdayaan adalah 0,31 dengan statistik-t sebesar 3,05 nilai ini lebih besar dari 1,96 maka pada selang kepercayaan 95% kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kepemimpinan semakin baik maka akan meningkatkan efektivitas pemberdayaan.

Dimensi kepemimpinan yang oleh keluarga miskin dianggap paling menentukan efektivitas pemberdayaan adalah kompetensi kepemimpinan, dalam arti kemampuannya untuk mengembangkan kegiatan sesuai potensi

keluarga, serta memiliki prakarsa untuk mencari jalan keluar bagi keluarga miskin yang telah lama dalam belenggu kemiskinan kultural maupun kemiskinan struktural. Dimensi kompetensi ini memiliki muatan yang paling tinggi dalam merefleksikan kepemimpinan yang dibutuhkan masyarakat miskin untuk dapat mengangkat harkat hidupnya, muatan itu mencapai 0,91 sehingga hampir sepenuhnya dapat merefleksikan variabel laten kepemimpinan yang tidak terukur. Adapun indikator yang merefleksikan dimensi kepemimpinan ini yang memperoleh dukungan tertinggi dari para keluarga miskin adalah bahwa para keluarga mengharapkan kepemimpinan yang memiliki kemampuan untuk memahami masalah yang dihadapi masyarakat lapis bawah dan dapat berusaha membantu mengatasi hambatan dimaksud.

Dilihat secara keseluruhan, dari kelimabelas indikator pada variabel kepemimpinan ini yang paling berpengaruh adalah indikator yang kedua yang menjadi pilihan para responden keluarga miskin di kota Bekasi. Deskripsi dari indikator kedua ini adalah: Pemimpin dengan jujur dan terus terang memberi tahu para keluarga kurang mampu tentang apa yang harus dilakukan supaya dapat maju. Dengan demikian para keluarga lapis bawah mendambakan agar pemimpin lokal/sosial yang mendampingi mereka dapat dengan jujur dan jelas jalan keluar bagaimana yang harus ditempuh agar dapat terlepas dari belenggu kemiskinan dan dapat menjadi makin mandiri.

Pengaruh Tata Pemerintahan terhadap Efektivitas Pemberdayaan

Hasil penelitian menyebutkan bahwa tata pemerintahan memiliki pengaruh terhadap efektivitas pemberdayaan. Dalam analisa terhadap data yang dikumpulkan dari lapangan menunjukkan bahwa tata pemerintahan memiliki koefisien jalur sebesar 0,34 dan dengan nilai statistik-t sebesar 2,94 yang lebih besar dari tabel-t sebesar 1,94 pada selang kepercayaan 95%, maka terbukti bahwa tata pemerintahan berpengaruh secara signifikan dan positif pada efektivitas pemberdayaan. Ini berarti bahwa semakin baik tata pemerintahan di kota Bekasi, maka akan semakin besar pengaruhnya dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberdayaan di kota Bekasi.

Dari hasil analisa juga diketahui bahwa dalam pelaksanaan survei yang dilakukan terhadap keluarga miskin anggota Posdaya beserta para stakeholdernya, masyarakat miskin

memilih dimensi bahwa semua kebijakan ditentukan atas konsensus masyarakat sebagai sebuah dimensi dengan muatan yang paling tinggi. Ini berarti bahwa partisipasi masyarakat lapis bawah dalam ikut serta menentukan berbagai kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat, maka keluarga lapis bawah perlu didengar dan diikutsertakan. Dimensi ini memiliki muatan yang relatif cukup tinggi, yaitu 0,89 yang berarti dimensi ini telah merefleksikan dengan baik variabel laten tata pemerintahan yang sebenarnya tidak terukur, karena tata pemerintahan pada hakekatnya merupakan sebuah konsep atau konstruk yang tidak terukur.

Adapun indikator yang berpengaruh pada dimensi tersebut diatas, yang telah dengan baik merefleksikan dimensi konsensus, adalah indikator pilihan masyarakat miskin yang menyatakan agar tata pemerintahan di kota Bekasi mampu menghasilkan dan membangun komunikasi serta sambungrasa dengan anggota masyarakat secara baik dan penuh kebersamaan. Indikator ini juga memiliki muatan yang cukup tinggi dalam merefleksikan dimensi konsensus, yaitu dengan muatan sebesar 0,79 yang merupakan muatan tertinggi diantara berbagai indikator yang merefleksikan dimensi konsensus. Dengan tingginya muatan indikator dalam merefleksikan dimensinya dan tingginya muatan dimensi dalam merefleksikan variabel laten tata pemerintahan, maka variabel tata pemerintahan telah terefleksikan dengan baik dalam survei yang dilakukan pada masyarakat miskin di kota Bekasi. Dengan demikian pengaruh tata pemerintahan terhadap efektivitas pemberdayaan memang sudah terukur dengan baik, sesuai persepsi para responden survei yang dilakukan di Bekasi.

Dari kelimabelas indikator pada variabel tata pemerintahan ini, yang menjadi pilihan masyarakat lapis bawah di kota Bekasi adalah indikator yang ke tujuh, yang menyatakan: Setiap anggota masyarakat lapis bawah di kota Bekasi memiliki kebebasan untuk memilih kehidupan yang lebih baik. Ini berarti masyarakat lapis bawah mendambakan kebebasan dan tidak mengalami paksaan dalam menjalani proses pemberdayaan agar dapat menjadi keluarga yang makin mandiri sesuai kemampuan dan potensi yang dimilikinya.

Pengaruh Etika Pemerintahan terhadap Efektivitas Pemberdayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh etika pemerintahan terhadap efektivitas

pemberdayaan telah terbukti. Analisa terhadap hasil survei di lapangan menunjukkan bahwa koefisien jalur dari etika pemerintahan terhadap efektivitas pemberdayaan adalah sebesar 0,27 dengan nilai statistik-t sebesar 3,00 yang lebih besar dari 1,96 pada selang kepercayaan 95%. Ini berarti bahwa etika pemerintahan memang berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap efektivitas pemberdayaan, semakin tinggi etika pemerintahan maka akan semakin efektif pemberdayaan.

Analisa terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi etika publik memiliki muatan yang paling tinggi, ini berarti bahwa dimensi etika publik telah merefleksikan dengan baik variabel etika pemerintahan yang merupakan variabel laten yang sesungguhnya tidak dapat diukur karena merupakan sebuah konstruk. Muatan dari dimensi ini sesuai hasil survei adalah 0,96 yang merupakan muatan yang relatif tinggi dan menggambarkan tingginya dimensi ini dalam merefleksikan variabel laten etika pemerintahan.

Adapun indikator yang mendukung dimensi ini sehingga mampu memiliki muatan yang relatif tinggi tersebut adalah indikator yang menyebutkan agar dalam rangka pemberdayaan, diharapkan oleh masyarakat miskin di kota Bekasi supaya pemberdayaan berlangsung dengan baik, maka pemerintah daerah dan kepanjangannya yang memerankan kegiatan pemberdayaan agar selalu mendengarkan sebanyak mungkin gagasan anggota agar tidak menyimpang dari aturan yang ada supaya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Indikator ini memiliki muatan yang cukup tinggi dalam merefleksikan dimensi etika publik, yaitu dengan muatan sebesar 0,84. Dengan tingginya muatan dimensi dan indikator dalam merefleksikan variabel etika pemerintahan ini, maka terbukti bahwa variabel laten etika pemerintahan yang merupakan konstruk, telah direfleksikan dengan baik dalam upaya pengukurannya, sehingga besarnya hasil perhitungan terhadap koefisien jalur dapat diharapkan mendekati kenyataan yang ada.

Pengaruh Efektivitas Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga miskin. Analisa terhadap data hasil survei menyebutkan besarnya koefisien jalur yang menggambarkan pengaruh efektivitas pemberdayaan terhadap kesejahteraan

selalu mendukung (*support*) dan memperhatikan masalah yang dihadapi untuk berusaha memecahkannya (*competent*).

Tata pemerintahan berpengaruh signifikan pada efektivitas pemberdayaan. Tata pemerintahan memiliki koefisien yang tertinggi diantara ketiga variabel laten eksogen, hal ini menunjukkan bahwa keluarga miskin merasakan pentingnya peranan tokoh masyarakat, pengurus Posdaya dan PKK, pengurus RW/RT yang selama ini terbukti telah menunjukkan perhatiannya yang sesuai dengan kebutuhan keluarga miskin. Paradigma yang memberikan peranan yang seimbang antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, memberikan harapan akan lebih membaiknya pendekatan pemberdayaan, disamping itu pengambilan kebijakan berdasar konsensus dan perhatian utama pada yang lemah/miskin juga merupakan harapan baru bagi keluarga miskin.

Etika pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemberdayaan. Sentuhan etika dalam hubungan pemerintahan memiliki peranan yang relatif cukup besar yang dampaknya ikut menentukan suksesnya kegiatan pemberdayaan. Masyarakat lapis bawah mendambakan pelaksana pemberdayaan yang selalu berpegang pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Efektivitas pemberdayaan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga miskin. Dimensi adaptabilitas/penyesuaian memiliki muatan yang tertinggi, sesuai pilihan para responden bahwa diperlukan cara hidup baru sesuai kemajuan pemberdayaan agar kehidupan para keluarga miskin dapat memanfaatkan kegiatan pemberdayaan, tanpa adanya kemampuan para keluarga yang diberdayakan, maka kegiatan pemberdayaan tidak akan efektif. Dimensi berikutnya yang menjadi pilihan responden keluarga miskin adalah efisiensi, yang memang merupakan prasyarat bagi suksesnya kegiatan pemberdayaan. Kepemimpinan, tata pemerintahan dan etika pemerintahan berpengaruh signifikan secara bersama-sama pada efektivitas pemberdayaan. Di samping itu, analisa terhadap besar pengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan keluarga miskin menunjukkan bahwa kepemimpinan, tata pemerintahan dan etika pemerintahan ketiganya memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin melalui efektivitas pemberdayaan.

Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel laten eksogen, yaitu kepemimpinan, tata pemerintahan, dan etika pemerintahan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga miskin melalui proses efektivitas pemberdayaan.

Meskipun variabel kepemimpinan, tata pemerintahan dan etika pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada efektivitas pemberdayaan, namun persentase pengaruh itu relatif kecil karena dalam kenyataannya pemberdayaan belum berlangsung secara efektif, sehingga akibatnya jumlah keluarga miskin relatif masih cukup besar.

Saran

Perlu dilakukan re-orientasi terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui penerapan paradigma baru, yaitu adanya pemberian peranan yang seimbang antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel efektivitas pemberdayaan merupakan variabel yang perlu diperhatikan, dikembangkannya model pemberdayaan yang efektif perlu segera dirumuskan.

Perlu dilakukan perombakan kebijakan dalam proses penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan meningkatkan kompetensi kepemimpinan, memanfaatkan peran masyarakat di wilayah setempat dengan pengawasan terbuka oleh masyarakat serta lebih memperhatikan etika pemerintahan untuk membatasi adanya peluang penyimpangan, melalui sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat lapis bawah. Keluarga lapis bawah lebih memerlukan perhatian (*care*) bukan sekedar pelayanan (*service*), diperlukan pendekatan yang dapat lebih menyentuh inti persoalan bukan sekedar formalitas pelaksanaan.

Perlu dilakukan penelitian lanjut, periode/kegiatan transisi yang perlu diikuti keluarga miskin sebelum menjadi keluarga sejahtera. Bentuk periode/kegiatan transisi yang tepat perlu lebih dikembangkan, salah satunya adalah melewati program Posdaya, untuk mengembalikan *self-confident* mereka bahwa kehidupan memang dapat menjadi lebih baik.

Pentingnya peranan masyarakat dalam program pemberdayaan dilandasi oleh adanya fenomena bahwa ditengah masyarakat terdapat pemimpin non-formal, pemuka masyarakat atau aktivis sosial kemasyarakatan yang memiliki kualifikasi yang dapat menyelami dan menyatu dengan warga miskin dan ide-idenya mudah diterima oleh warga miskin tersebut. Karena itu

Pemerintah Daerah perlu mendorong peranan dan keikutsertaan masyarakat disekitar pemukiman warga miskin yang terbukti sangat menentukan efektivitas program pemberdayaan. Pola kemitraan warga masyarakat yang lebih mampu dengan yang miskin serta perlu diberdayakan merupakan pola pemberdayaan yang ditempuh oleh Posdaya.

DAFTAR ACUAN

- Bappenas. 2008. *Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009*.
- BPS. 2010. *Penghitungan dan Indikator Kemiskinan Makro*.
- BPS Kota Bekasi. 2010. *Statistik Daerah Kota Bekasi 2011*.
- Hamdi. 2009. Reformasi Birokrasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 30: 1-10. MIPI.
- Hubeis M. 2008. *Manajemen Kreativitas dan Inovasi Dalam Bisnis*. Hecca Publishing.
- INSTAT. 2012. *Survei Posdaya di kota Bekasi 2011-2012*.
- Joreskog KG, Sorbom D. 1993. *Lisrel 8: Structural Equation Modelling with the Simplis Command Language*. Chicago: Scientific Software International, Inc.
- Kertapraja EK. 2010. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Inner.
- Kouzes JM, Posner BZ. 1993. *Credibility*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Ndraha T. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta.
- Osborne D, Gabler T. 1993. *Reinventing Government*. USA: Penguin Book.
- Sekaran U. 2003. *Research Methods for Business*. 4th ed. USA: John Willey & Sons, Inc.
- Stiglitz JE, Sen A, Fitousi JP. 2009. *The Rise and Fall of GDP*.
- Suyono H. 2009. *Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)*. Balai Pustaka.
- Wasistiono S. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Wijanto SH. 2008. *Structural Equation Modelling*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu.

